ALIANSI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM UPAYA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN SEMENANJUNG KOREA (2010-2016)

Edward Giovanny Marpaung
44313037

Skripsi ini dibawah bimbingan :
Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132

E-mail :
Ed.marpaung@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the efforts made by the United States and South Korea as well as the constraints faced and the progress to the achievements that have been gained in the effort to maintain the stability of security on the Korean peninsula. The research method used in this research is qualitative method. In collecting the data the researchers conducted field studies, literature study, online search and use purposive techniques to determine sources. While the technique to analyze data using data triangulation. Researchers analyzed the various forms and efforts of the United States and South Korea in an effort to maintain the security stability of the Korean peninsula, the efforts of the United States and South Korea are done through extended deterrence, with the aim to counter the North Korean attack. In addition, other efforts were made by placing troops, joint military exercises, sharing defense costs, transfer operational controls, and ballistic missile defense.The conclusions of this study indicate that Conflict on the Korean Peninsula is not new however as North and South Korea have long had tensions with one another that dates back prior to the Korean War, South Korea is aware of the enormous military threat from its North Korean neighbor. To anticipate it certainly South Korea must have a strategy to deal with all kinds of threats from North Korea.The U.S.-South Korea security alliance was forged in direct response to pressing security needs on the Korean peninsula. This allows for more active cooperation with the United States to respond to North Korea's nuclear challenge and enhance regional and global stability security and prosperity.

Keywords : Conflict, Korean Peninsula, North Korea, South Korea, United States, Security Stability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta kendala yang dihadapi dan perkembangan hingga pencapaian yang telah didapat dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam mengumpulkan data-data peneliti melakukan studi lapangan, studi pustaka, penelusuran online dan menggunakan teknik purposive untuk menentukan narasumber. Sedangkan teknik untuk menganalisis data menggunakan triangulasi data. Peneliti menganalisa beragam bentuk dan upaya Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas kemanan semenanjung korea, upaya Amerika Serikat dan Korea Selatan tersebut dilakukan melalui extended deterrence, dengan tujuan untuk menangkal serangan Korea Utara. Selain itu upaya lainnya dilakukan dengan cara penempatan pasukan, latihan militer bersama, saling berbagi biaya pertahanan, pengalihan kontrol operasional, serta pertahanan rudal balistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa Konflik di Semenanjung Korea bukan masalah baru namun karena Korea Utara dan Korea Selatan telah lama memiliki ketegangan satu sama lain yang terjadi sebelum Perang Korea. Korea Selatan menyadari akan ancaman militer yang begitu besar dari negara tetangganya Korea Utara. untuk mengantisipasi hal itu tentunya Korea Selatan harus memiliki strategi untuk menghadapi segala macam ancaman dari Korea Utara. Aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan keamanan di Semenanjung Korea, hal ini memungkinkan kerjasama yang lebih aktif dengan Amerika Serikat untuk menanggapi tantangan nuklir Korea Utara dan meningkatkan stabilitas dan kemakmuran regional dan global.

Kata kunci : Konflik, Semenanjung Korea, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Stabilitas Keamanan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional pasca perang dingin, Semenanjung Korea tidak hanya telah menjadi pusat wacana keamanan Asia Timur, para ilmuwan terutama dengan perspektif yang mengarah pandangannya ke barat mendiagnosis bahwa pengembangan institusionalisasi regional di Asia Timur Laut, tidak adanya kepemimpinan visioner di Amerika Serikat dan Tiongkok, dan strategi bertahan hidup Korea Utara yang merusak diri sendiri sulit untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea (Park, 2011:1).

Semenanjung Korea dianggap sebagai suatu kawasan strategis dalam hubungan internasional di Asia Timur dimana Semenanjung Korea memiliki arti yang cukup penting dalam kepentingan nasional bagi keempat negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat serta untuk membentuk dan mempertahankan balance of power di wilayah Asia Timur (Mas'oed, 2005: 18-19).

Stabilitas keamanan di Semenanjung Korea saat ini tidak kondusif semua itu tidak terlepas dari ancaman yang diberikan oleh Korea Utara meskipun antara Korea Selatan dan Korea Utara sudah terjadi kesepakan perjanjian gencatan senjata atau armistice aggrement, namun secara teknis kedua negara tersebut masih dalam status berperang. Melihat akan hal itu Korea Selatan perlu untuk memiliki pihak yang dapat melindungi negaranya bila sewaktu-waktu perang dengan Korea Utara akan pecah kembali (Mas'oed, 2005:1).

Antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat melakukan aliansi yaitu aliansi pertahanan bersama yang mengatur jika salah satu negara diserang oleh pihak ketiga maka pihak lain akan bertindak, dan juga kesepakatan meliputi bantuan militer untuk kebijakan salah satu negara sebagai contoh Korea Selatan turut membantu Amerika Serikat dalam kampanye perangnya di

Vietnam dan Irak. Sejak saat itu Amerika Serikat adalah negara pelindung utama bagi Korea Selatan dan juga Korea Selatan sebagai basis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (http://news.findlaw.com /cnn/ docs/ korea/ kwarmagr072753. Html [10/06/ 2017]).

Aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan keamanan di Semenanjung Korea. Kerentanan Korea Selatan terhadap serangan dari Korea Utara, dan kepentingan strategisnya sebagai benteng melawan penyebaran agresi komunis pada awal perang dingin, merajut kebutuhan keamanan Amerika dan Korea Selatan bersama-sama. Aliansi tersebut memberikan jaminan keamanan kepada Korea Selatan yang lemah sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat untuk pembelaannya (Synder, 2009:3).

Secara historis, setiap kali terjadi perubahan politik besar di wilayah Asia Timur, Semenanjung Korea selalu menjadi titik kritis. Kebenaran historis ini tidak berubah di era pra-modern atau bahkan setelah perkembangan hubungan internasional di Asia Timur di era modern. Sejarah tidak mungkin terulang lagi, karena realitas hubungan internasional post-modern abad kedua puluh satu sangat berbeda dengan hubungan internasional masa lalu untuk negara-negara Asia Timur manapun yang menggunakan konflik militer. Namun, kawasan ini masih berada di bawah lingkungan diplomatik yang bermusuhan karena sengketa historis dan teritorial serta perlombaan senjata intensif (Park, 2011:223).

Dari perspektif Korea Selatan, hubungan dengan Tiongkok tidak terlalu penting dibanding hubungan Korea Selatan-Amerika Serikat. Untuk masa depan Asia Timur yang lebih makmur dan stabil, Korea, Tiongkok, dan Amerika Serikat harus menemukan kesamaan untuk saling memahami maksud masing-masing dengan cara yang konstruktif. Secara khusus, Korea Selatan dan Amerika Serikat harus berupaya mengurangi konotasi negatif yang terkait dengan istilah aliansi strategis. Banyak orang Tiongkok memahami konsep kemitraan berbasis nilai yang dimaksudkan untuk mengecualikan negara-negara dengan nilai yang berbeda, khususnya Tiongkok. Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat tidak bertujuan untuk mencegah meningkatnya aktifitas Tiongkok sebaliknya, mereka bermaksud untuk mengatasi ancaman keamanan komprehensif masyarakat internasional di masa depan (Park, 2011:224-225).

Situasi stabilitas politik dan keamanan di semenanjung Korea saat ini masih belum memperlihatkan keadaan yang membaik. Masalah utama di semenanjung ini pada umumnya adalah ancaman nuklir Korea Utara. Kegiatan reaktor nuklir yang tidak transparan menjadikan situasi di semenanjung Korea menjadi tidak menentu (Mas'oed, 2005:1).

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sempat membaik pada tahun 1991, ketika muncul "Agreement on Reconciliation, Non aggression and Exchanges and Cooperation between the South and the North" yang sering dikenal sebagai "Basic Agreement" yang mengakui niatan baik reunifikasi kedua negara tersebut. Pada tahun 1992 juga muncul kesepakatan "Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula" meski sudah muncul beberapa kesepakatan dalam menjalin hubungan baik kedua negara, arus politik domestik Korea Utara dan Korea Selatan yang berbeda menyebabkan pasang surut hubungan keduanya (http://articles.cnn. Com2010-05-25/ world/ n. korea. Threats_ 1_ south- korean- president- lee- north- south-korean- peninsula? _s =PM: WORLD [10/04/2017]).

Perbedaan pandangan terhadap keberadaan nuklir antara Korea Utara dan Selatan serta meninggalnya presiden Korea Utara pada masa itu, Kim Il Sung, menjadi salah satu faktor pasang surut hubungan kedua negara. Sejak dikeluarkannya kesepakatan

"Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula", muncul beberapa fenomena yang membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan semakin memburuk. Pada tahun 2009, Korea Utara secara terang-terangan melakukan uji coba rudal balistik di sekitar laut Jepang. Hal ini membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang sebelumnya membaik malah berbalik menjadi buruk. Peran negara luar kawasan seperti Amerika mulai gencar dilakukan dengan terbentuknya UN Security Council Resolution (UNSCR) pada tahun 2009. Pada tahun 2010, kapal perang Korea Selatan ditemukan tertembak rudal dari Korea Utara dan pulau Yeonpyeong diserang oleh militer Korea Utara. Insiden ini telah membuat hubungan kedua negara semakin buruk dan bahkan menutup komunikasi bilateral. UNSCR

Kepentingan Tiongkok di Semenanjung Korea tercermin dalam kebijakan lama Beijing tentang tidak ada perang, tidak ada ketidakstabilan, dan tidak ada kekuatan nuklir. Mempertahankan kedamaian adalah prioritas tertinggi Tiongkok. Perang Korea pada awal 1950an, yang mengakibatkan ratusan ribu korban Tiongkok dan komitmen Amerika Serikat yang diperbarui untuk keamanan Taiwan yang berlanjut sampai hari ini. Konflik militer lainnya di semenanjung Korea yang akan menghambat pembangunan ekonomi Tiongkok dan sangat merusak citra global dengan hubungannya sesama tetangganya dan ini adalah mimpi buruk bagi para pemimpin Tiongkok (Glaser, 2012:1).

Kepentingan Jepang sepanjang sejarahnya, Jepang selalu tertarik dan peduli dengan Semenanjung Korea, secara politis, ekonomi, dan budaya. Orang Jepang telah hidup dengan nasi yang dibawa dari Korea pada periode/zaman Yayoi (pada abad ke 8 sebelum masehi). Sejak pembagian Semenanjung Korea, strategi besar Jepang adalah untuk mencegah Semenanjung Korea menjadi terbagi-bagi. Hal ini telah terlihat melalui kebijakan jarak jauh tahun 1970an atau lebih spesifik Jepang selalu memberi bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi pasca Perang Dingin untuk menopang rezim Korea Utara. Kepentingan pertama, Jepang selalu mencoba berhubungan secara khusus dengan Korea yang bekerja untuk keuntungan keamanan Jepang di wilayah tersebut. Kedua, Jepang selalu melihat kebijakan Korea tertanam dalam konteks yang lebih besar dari keseimbangan kekuatan daerah. Dulu setiap keputusam di ambil didasarkan pada dominasi militer sepihak dari Semenanjung Korea. Hari ini, setiap keputusan didasarkan pada keselarasan dan kerja sama dalam konteks hubungan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Poin yang dilihat di sini adalah bahwa tidak satu pun dari tujuan ini secara logis menentukan penentangan Jepang terhadap Semenanjung Korea yang bersatu di abad ke 21 (Song, 2016:151-152).

Kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea hampir sama dengan kepentingan Tiongkok namun sangat berbeda dalam prioritas. Amerika Serikat menekankan prioritas denuklirisasi Semenanjung Korea. Mencegah proliferasi teknologi nuklir dan rudal ke negara bagian lain dan aktor non-negara adalah kepentingan penting Amerika Serikat (Glaser, 2012:3).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi arah yang jelas, tegas dan konkrit dari latar belakang dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas kemanan Semenanjung Korea (2010-2016)?

Rumusan Masalah Minor

Untuk memfokuskan pertanyaan umum tersebut, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan

dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea?
2. Apa kendala yang dihadapi Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea?
3. Bagaimana perkembangan serta pencapaian dari aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea?

2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan internasional merupakan displin ilmu yang sedang tumbuh berkembang. Dahulu dalam interaksinya hanya melibatkan aktor negara, namun sekarang aktor bukan negara dapat terlibat dalam berinteraksi antar negara. Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abab ke 19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu diseputar masalah peperangan dan perdamaian (*war and peace*), maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah kepersoalan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime*), upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya (Hermawan, 2007:1-2).

Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non negara. Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik dari aktor pemerintah maupun bukan pemerintah. Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005:128).

Terdapat dua isu tradisional utama dalam Hubungan Internasioanl yakni isu keamanan nasional dan ekonomi global. Robert Jackson dan Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependens perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembagas swadaya masyarakat (LSM) Internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson &Sorensen, 2005:34).

2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan dan kesejahteraan, pasti terdapat serta merupakan landasan dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu power yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

2.3 Konsep Keamanan

Definisi yang paling sering digunakan oleh penstudi HI adalah definisi dari Barry Buzan yang dalam bukunya People, States, and Fear mengatakan bahwa Keamanan, dalam arti obyektif, mengukur tidak adanya ancaman terhadap nilai yang diperoleh, dalam pengertian subjektif, tidak adanya rasa takut bahwa nilai-nilai semacam itu akan diserang (Buzan, 2008:4).

Keamanan kolektif menyediakan landasan normatif dan sarana pengaturan perilaku negara-negara berdaulat dan konflik di antara mereka. Selain itu keamanan kolektif menyediakan pula prosedur kelembagaan yakni legalisasi respon kolektif dalam mengatasi ancaman tradisional berorientasi militer untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Namun, tantangan terhadap kedaulatan keamanan kolektif telah muncul, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Hal ini dikarenakan ancaman keamanan yang dirasakan makin beragam, seperti munculnya masalah keamanan transnasional, semakin besar peran yang dimainkan oleh aktor non-negara. Kondisi demikian pada gilirannya menumbuhkan dugaan ketidakefektifan akan pengaturan internasional dalam menanggapi tantangan-tantangan keamanan yang dinamis tersebut.

2.4 Stabilitas Keamanan

Jika berbicara mengenai keamanan, maka erat kaitannya dengan permasalahan stabilitas. Stabilitas nasional yang dimiliki suatu negara pun menjadi penting. Hal ini dikarenakan stabilitas nasional dapat menjadi alat ukur kemampuan suatu negara dalam mengatasi ancaman multidimensional untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga negaranya. Cara yang dilakukan adalah dengan menyeimbangkan semua instrument kebijakan negara melalui pemerintahan (Paleri, 2008:449).

2.5 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000:45).

2.6 Aliansi

Salah satu upaya dalam *balance of power* adalah pembentukan aliansi. Aliansi adalah sebuah koalisi negara-negara yang mengoordinasikan tindakan mereka untuk sejumlah tujuan tertentu. Kebanyakan aliansi diformalkan dalam perjanjian tertulis, yang

memfokuskan pada ancaman bersama dan isu-isu yang berhubungan dengan keamanan internasional. Jika aktor-aktor bertujuan untuk terikat bersama dalam jangka waktu pendek, kurang formal, atau lebih kepada isu yang spesifik, asosiasi tersebut biasanya disebut dengan koalisi daripada aliansi (Yani dkk, 2017:84).

2.7 Kerangka Pemikiran

Keadaan yang terjadi di Semenanjung Korea saat ini telah menjadi tinjauan tambahan banyak pihak dalam melihat keadaan keamanan internasional dan hal tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini bukan tidak beralasan melihat bahwa dalam perang yang akhirnya membagi Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara tersebut, isu yang muncul bukan hanya mengenai senjata nuklir, tetapi juga keterlibatan negara lain meskipun secara tidak langsung. Aktor yang berpengaruh bukan hanya kedua negara di Semenanjung Korea tetapi juga melibatkan negara-negara besar di baliknya. Terlihat melalui keterlibatan negara besar yang memiliki kepentingan di dalam Korea Selatan seperti Amerika Serikat serta kepentingan di Korea Utara Seperti Tiongkok.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan hingga pada waktu ini masih terpelihara dengan baik karena memang ada kepentingan yang saling membutuhkan, Kepentingan Amerika Serikat dalam krisis Semenanjung Korea jelas terlihat dari perbuatan, pernyataan dan tanggapannya. Salah satunya adalah memperkuat keberadaannya disana khususnya di Asia Timur sehingga membuat negara-negara di wilayah tersebut untuk semakin tergantung kepadanya. Amerika Serikat berusaha mengendalikan krisis untuk menguatkan posisi di kawasan Asia Timur, dan menunjukkan kepemimpinannya, terutama untuk menakut-nakuti Tiongkok bahwa Amerika Serikat tidak segan untuk mengobarkan perang di tetangga dekat dan sekutu Tiongkok, seperti Korea Utara kapan saja.

Peningkatan kemampuan militer dibutuhkan Korea Selatan karena ancaman serangan dari Korea Utara masih potensial. Pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di Korea Selatan sampai saat ini sehingga membuat Korea Selatan merasa aman dari invasi Korea Utara. Aliansi ini sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

Dalam menjaga keamanan, faktor militer masih menduduki posisi penting dalam keamanan negara, walaupun dalam lingkungan keamanan internasional ditekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan politik, ekonomi, dan diplomasi, namun masih banyak negara menganggap cara militer merupakan usaha terpenting untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Reformasi militer besar-besaran dilakukan dengan mengembangkan senjata teknologi tinggi hampir dilakukan di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan situasi baru dan dalam rangka menjaga kepentingannya masing-masing, beberapa negara telah menyesuaikan kebijakan militer, strategi militer dan meningkatkan pertahanan dalam memperbaiki kualitas kekuatan militer.

3. PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan Umum Semenanjung Korea

Semenanjung Korea terletak di Asia Timur yang membentang dari selatan benua Asia sekitar 683 mil (1.100 km). Saat ini, secara politis dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara terletak di bagian utara semenanjung dan meluas dari Tiongkok selatan ke paralel ke 38 dari garis lintang. Korea Selatan kemudian meluas dari daerah itu dan mencakup wilayah Semenanjung Korea lainnya. Semenanjung Korea masuk ke dalam berita sebagian besar tahun 2010, dan

terutama menjelang akhir tahun, karena konflik yang berkembang antara kedua negara. Konflik di Semenanjung Korea memiliki sejarah panjang Perang Korea, yang berakhir pada 1953 (https://www.thoughtco.com/ tensions- and- conflict- korean- peninsula 1435251[28/07/17]).

Situasi keamanan Semenanjung Korea pada umumnya didominasi program nuklir Korea Utara dan pada khususnya telah ditandai dengan memburuknya hubungan antar-Korea dan mencapai puncak pada tahun 2010, ketika kedua Korea berada di ambang perang yang panas. Pada saat yang sama, mekanisme untuk menyelesaikan, pembekukan, dan pada akhirnya menghilangkan ketegangan di semenanjung hampir sama sekali tidak efektif di tahun 2011.

Ini berlaku baik untuk format bilateral maupun alat utama internasional yang dirancang untuk mencapai tujuan *six party talk* di Beijing. Kebetulan, konflik militer, yang mengakibatkan pemboman Pulau Yeonpyeong pada tanggal 23 November 2010, menegaskan kembali kebenaran bersama bahwa, ketika para diplomat menahan diri dari sebuah dialog dan diam, senjata mulai berbicara (http//:www.apcss.org/ wp-content/ uploads/ 2012/09/Chapter12.pdf [28/07/17]).

3.2 Analisa Hasil Penelitian

3.2.1 Upaya-Upaya yang Telah dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea

Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah sekutu di bawah Perjanjian Mutual Defense 1953. Berdasarkan kesepakatan tersebut, personil militer A.S. telah mempertahankan kehadirannya di Semenanjung Korea dan berkomitmen untuk membantu Korea Selatan mempertahankan diri, terutama melawan agresi apapun dari Korea Utara. Amerika Serikat mempertahankan sekitar 28.500 tentara di ROK. Pada 2007 dan 2008, komandan A.S. di Korea Selatan menyatakan bahwa peran A.S. di masa depan untuk pertahanan Korea Selatan akan terutama merupakan angkatan udara dan angkatan laut. Angkatan bersenjata ROK sekarang berjumlah sekitar 630.000 tentara, dengan sekitar 500.000 di antaranya berada di Angkatan Darat dan sekitar 65.000 di Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Sejak tahun 2004, Angkatan Udara A.S. telah meningkatkan kekuatannya di Korea Selatan melalui rotasi reguler ke Korea Selatan dari pesawat pemogokan tingkat lanjut. Rotasi ini bukanlah kehadiran permanen, namun pesawat tersebut sering kali berada di Korea Selatan selama berminggu-minggu dan terkadang berbulan-bulan untuk pelatihan.

Korea Selatan termasuk di bawah payung nuklir AS, yang juga dikenal sebagai extended deterrence. Pemahaman bilateral antara Washington dan Seoul memberi AS kekuatan fleksibilitas strategis untuk menanggapi kontinjensi di luar semenanjung, namun dengan syarat bahwa Korea Selatan harus menyetujui penempatan mereka dalam konflik Asia Timur. Di masa lalu, isu seputar penempatan pasukan A.S. telah menjadi titik nyala untuk ketidaksetujuan publik terhadap aliansi militer, yang dipimpin oleh kelompok politik progresif. Namun dalam beberapa tahun terakhir dukungan publik untuk aliansi telah menjadi lebih luas dan lebih tahan terhadap insiden yang melibatkan pangkalan dan tentara A.S. di Korea Selatan.

3.2.1.1 *Extended Deterrence*

Selama hampir enam dekade, senjata nuklir telah menjadi elemen utama urusan internasional di Asia Timur. Dimulai dengan penggunaan senjata nuklir yang paksa pada tahun 1945 untuk memaksa Jepang menyerah dan memberi sinyal pada Amerika dalam urutan pascaperang, senjata nuklir menjadi landasan sistem ancaman bipolar yang kaku yang didasarkan pada pencegahan strategis dan terorganisir di seputar keseimbangan teror global antara yang sebelumnya. Uni Soviet dan Amerika Serikat (http://nautilus.org

/napsnet/ napsnet -special-reports/extended-nuclear-deterrence-global-abolition-and-korea/ [28/07/17]).

Penggunaan awal proyeksi ancaman nuklir Amerika terhadap Tiongkok dalam Perang Korea dan pada tahun 1958, krisis Quemoy-Matsu (pencegahan) dan upaya berisiko tinggi lainnya untuk mencegah dan memaksa lawan menghasilkan sekumpulan aliansi bilateral yang diciptakan oleh John Foster Dulles, Sebagian didasarkan pada konsep extended nuclear deterance (END), yang menghasilkan pendekatan ketiga yang membentuk bagaimana konflik terwujud di wilayah ini. Ini adalah kepastian strategis para pemimpin sekutu dan masyarakat umum (http://nautilus.org/ napsnet/ napsnet –special -reports/extended-nuclear-deterrence-global-abolition-and-korea/ [28/07/17]).

Pada tahun 1978, penarikan senjata nuklir yang hampir selesai dari Korea yang dimulai pada tahun 1976 di bawah Presiden Carter dibalik karena reaksi balik konservatif, dan Korea tetap terlibat dalam pemberian ke Jepang oleh Amerika Serikat. Sebagai bagian dari pembalikan global dari penyebaran 1958 pada tahun 1991, Presiden Bush Sr. menarik senjata nuklir AS dari ROK, dan penarikan AS menjadi bagian dari drama yang dilipat di sekitar peledak nuklir Korea Utara yang muncul di depan umum pada tahun 1992 ketika IAEA menemukan bahwa deklarasi nuklir DPRK. Tidak sesuai dengan data lingkungan yang dikumpulkan dari fasilitas Yongbyon (http://nautilus.org/ napsnet/ napsnet- special- reports/ extended- nuclear-deterrence- global- abolition- and- korea/ [28/07/17]).

Angkatan bersenjata Korea Selatan sejak berdiri sebagai negara merdeka berada di bawah kendali United Nations Command (UNC). Namun, sejak tahun 1978, Amerika Serikat dan Korea Selatan membentuk Combined Forces Command (CFC). Kedua komando tersebut bejalan secara simultan. CFC memiliki fungsi menangkal atau menggagalkan setiap agresi militer yang diarahkan ke Korea Selatan (http://www.usfk.mil/ usfk/ content. combined. forces.command.46. [28/07/17]). Sementara UNC melanjutkan misi yang berkaitan dengan implementasi armistice agreement dan pelibatan negara ketiga jika dalam kondisi perang atau kondisi lainnya (Effendi, 2013:63).

3.2.1.2 Penempatan Pasukan Amerika Serikat

Amerika Serikat dan Korea Selatan berkomitmen untuk mengurangi jumlah personil USFK dengan total 12.500 personil dalam tiga tahapan hingga tahun 2008. Pengurangan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah personil dari 37.500 personil pada 2003 menjadi 32.500 personil di 2004 dan akhirnya mencapai angka 25.000 di 2008. Namun pada tahun 2008, kedua negara setuju untuk mempertahankan jumlah USFK pada angka 28.500 dan sampai kepada tahun 2010-2013 penempatan pasukan tetap dalam jumlah 28.500, Namun ada penambahan jumlah pasukan di tahun 2013-2014 sebesar 800 jumlah pasukan dan hampir mencapai 35.000 pasukan pada tahun 2016.

Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menyetujui untuk dilakukannya relokasi markas USFK. Terdapat dua tujuan dalam relokasi ini yaitu memindahkan Yongsan base di Seoul ke U.S Army Garrison (USAG) Humphreys yang berlokasi di kota Pyeongtaek dan penarikan 10.000 personil dari DMZ ke Han River (Manyin, dkk, 2011:19). Kawasan Seoul yang semakin padat dengan adanya urbanisasi menjadi alasan pemindahan lokasi militer Amerika Serikat.

Rencana penataan kembali seluruh pasukan A.S. dari basis dekat perbatasan zona demiliterisasi (DMZ) dengan Korea Utara ke basis lebih jauh ke selatan berlanjut setelah penundaan awal, namun tantangan dengan postur kekuatan USFK tetap ada. Tingkat pasukan tetap sekitar 28.500. Rencana

penataan kembali mencerminkan pergeseran menuju peran pendukung untuk USFK dan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari lokasi basis Yongsan AS yang besar di pusat kota Seoul (Manyin, 2016:16).

3.2.1.3 Latihan Militer Bersama

Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer pertamanya pada tahun 1969 dengan nama Focus Retina Exercise di bawah komando UNC. Dua tahun kemudian, Freedom Bolt Exercise dengan melibatkan pasukan khusus Amerika Serikat. Peningkatan kapabilitas militer Korea Utara pasca Perang Vietnam turut berdampak pada stabilitas Semenanjung Korea. Korea Selatan dan Amerika Serikat mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan latihan bersama dengan nama Team Spirit. Latihan ini memiliki tujuan:

1. Menangkal Korea Utara dari kemungkinan perang lanjutan.
2. Menyediakan kesempatan latihan lapangan pada tingkat divisi untuk militer kedua negara.
3. Mengembangkan kemampuan taktik yang disesuaikan dengan kondisi geografis Korea dan meningkatkan kemampuan pengerahan pasukan militer tambahan Amerika Serikat (Effendi, 2013:66).

3.2.1.4 *Defense Cost Sharing*

Sejak tahun 1991, Korea Selatan telah memberikan dukungan finansial melalui serangkaian *Special Measures Agreements* (SMA) untuk mengimbangi biaya penempatan pasukan A.S. di Korea. Pada bulan Januari 2014, Seoul dan Washington sepakat untuk mengikuti lima tahun SMA berikutnya, yang mencakup 2014-2018. Berdasarkan kesepakatan baru tersebut, Seoul akan meningkatkan kontribusinya sebesar 6% menjadi 920 miliar won Korea ($867 juta) pada tahun 2014 dan kemudian meningkatkan pembayaran tahunannya dengan tingkat inflasi. SMA baru ini juga membuat penggunaan dana Korea Selatan di A.S. lebih transparan daripada di masa lalu, sebagai tanggapan atas kritik Korea Selatan. Kementerian Pertahanan ROK harus menyetujui setiap kontrak yang dikenakan dana SMA, dan USFK akan menyerahkan laporan tahunan mengenai dana SMA ke majelis nasional. Bahkan dengan perubahan ini, anggota parlemen oposisi Korea mengeluh bahwa kesepakatan tersebut memalukan dan bahwa USFK dapat menggunakan dana SMA untuk membiayai sebagian rencana relokasi yang melanggar perjanjian tahun 2004 (Manyin, 2016:19).

3.2.1.5 *Transfer Operational* (OPCON)

Amerika Serikat telah sepakat untuk menyerahkan perintah tentara Korea ke Korea Selatan, namun kedua pihak telah menunda pengalihan ini selama beberapa tahun. Di bawah pengaturan komando saat ini, yang merupakan warisan kepemimpinan A.S. pada koalisi U.N pada Perang Korea 1950-1953, tentara Korea Selatan akan berada di bawah komando pasukan A.S. jika terjadi perang di semenanjung tersebut. Rencana untuk mentransfer kontrol operasional masa perang mengakui kemajuan Korea Selatan dalam kekuatan ekonomi dan militer sejak Perang Korea dan dipandang oleh banyak orang Korea penting untuk kedaulatan Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian tahun 2007, komando pasukan gabungan A.S.-ROK (CFC), yang dipimpin oleh komandan A.S. di Korea, akan diganti dengan perintah militer A.S. dan ROK yang terpisah nama sementara dari perintah A.S. yang baru adalah Korea Command (KORCOM). Ketika angkatan bersenjata A.S. dan ROK beroperasi sebagai kekuatan gabungan di bawah struktur komando yang baru, pasukan A.S. mungkin berada di bawah komando operasional petugas umum Korea, namun perwira umum A.S. harus bertanggung jawab atas subkomponen A.S.. Pusat kerjasama militer bilateral akan bertanggung jawab untuk merencanakan operasi militer, latihan militer, dukungan logistik, dan pertukaran intelijen, dan

membantu pengoperasian sistem komunikasi, komando, kontrol, dan komputer. Tidak jelas apa peran Komando U.N., yang juga Komandan USFK, akan ada dalam pengaturan di masa depan (Manyin, 2016:20).

Sebagai kesaksian kepada Kongres pada bulan April 2015, Komandan Jenderal USFK Curtis Scaparrotti menjelaskan tiga kondisi umum untuk transfer Opcon:

1. Korea Selatan harus mengembangkan kapasitas komando dan kontrol untuk memimpin kekuatan gabungan dan multinasional dalam konflik intensitas tinggi.
2. Korea Selatan harus memperbaiki kemampuannya untuk menanggapi ancaman nuklir dan rudal yang terus berlanjut di Korea Utara.
3. Peralihan Opcon harus berlangsung pada saat yang kondusif untuk transisi. Scaparrotti menyatakan bahwa area utama perhatian untuk memperbaiki kemampuan Korea Selatan adalah aset C4 (komando, kontrol, komputer, dan sistem komunikasi), BMD, amunisi, dan ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian). Kabarnya, pengalihan Opcon mungkin tidak akan terjadi hingga 2020 nanti (Manyin, 2016:20).

3.2.1.6 Pertahanan Rudal Balistik dan Potensi Penempatan *Terminal High Area Defense* (THAAD)

Sebagai ancaman rudal balistik Korea Utara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memeriksa bagaimana meningkatkan kemampuan BMD mereka untuk mempertahankan pasukan Korea Selatan dan A.S. yang ditempatkan di sana. Amerika Serikat telah mendesak Korea Selatan untuk mengembangkan atau memperoleh kemampuan BMD yang canggih dan mengintegrasikannya dengan sistem BMD A.S. dan sekutu di wilayah ini. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan A.S. menyatakan bahwa sistem pertahanan rudal regional akan lebih efektif melawan peluncuran rudal Korea Utara dan akan berbagi beban pertahanan antar sekutu. Namun, Washington dan Seoul telah menetapkan kebijakan interoperabilitas daripada integrasi, setidaknya untuk jangka pendek. Seoul telah tahan terhadap konsep sistem BMD terpadu regional karena beberapa alasan keinginan, terutama yang kuat di kalangan orang Korea yang progresif, untuk otonomi yang lebih strategis sebuah keengganan untuk mengiritasi Tiongkok, yang secara konsisten menyuarakan oposisi terhadap penerapan BMD A.S. dan ketidakpedulian untuk bekerja sama dengan Jepang karena hubungan yang buruk berdasarkan perselisihan mengenai masalah historis dan territorial (Manyin, 2013:15).

Korea Selatan telah menempatkan penekanan berat pada pengembangan sistem pertahanan berteknologi tinggi yang asli. Korea Selatan sedang mengembangkan sistem pertahanan rudalnya sendiri, yang disebut Korea Air and Missile Defense (KAMD), yang dapat dibandingkan dengan sistem pertahanan udara Patriot generasi PAC-2-a generasi kedua. KAMD akan dapat dioperasikan dengan sistem aliansi dan bertujuan untuk secara bertahap menggabungkan peralatan BMD yang lebih maju karena elemen-elemen tersebut diperoleh. Angkatan Laut ROK memiliki tiga kapal perusak dengan perangkat lunak pelacak Aegis namun tidak ada pencegat rudal, dan lapangan pendekat POR-2 ROK Army.

3.2.2 Kendala-Kendala yang di Hadapi Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea

Dengan ancaman nuklir dan rudal yang terus memburuk dari DPRK, ROK dan Amerika Serikat, sebagai sekutu, berdiri di persimpangan yang penting. Meskipun Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki sejarah bekerja sama untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, mereka telah dikritik karena gagal bertindak secara sinkron selama

masa ketegangan yang meningkat, karena perbedaan persepsi dan pilihan kebijakan di menghadapi ancaman nuklir Korea Utara http://thediplomat.com/2017/06/3-obstacles-to-us-south-korea-cooperation-on-the-north-korea-issue/ [28/07/17]).

3.2.2.1 Perpecahan Politik dikedua Negara

Karena berbagai pilihan kebijakan di Korea Utara lebih terlihat di tingkat domestik. Di era krisis nuklir Korea Utara ini, yang berlanjut di bawah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Pyongyang terus menguji kemampuan nuklir dan misilnya. Namun, aliansi tersebut tidak dapat menahan respon tegas dan seimbang karena perpecahan politik dalam negeri. Amerika Serikat telah mengambil sikap hati-hati mengenai intervensi militer setelah 15 tahun perang di Afghanistan dan Irak, dan tidak memiliki kekuatan yang menentukan untuk menerobos dinamika berdarah dari *Six Party Talk*, yang kini semakin diperumit oleh bangkitnya Tiongkok, normalisasi militer Jepang, dan Rusia yang semakin tegas. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki kesulitan sendiri dalam menerapkan kebijakan yang konsisten terhadap Korea Utara karena perselisihan ideologis antara kamp-kamp konservatif dan progresif.

3.2.2.2 Perbedaan dalam Persepsi Ancaman

Hambatan kedua adalah persepsi ancaman yang berbeda dalam aliansi. Meskipun Korea Utara meningkatkan intensitas pemerasan dan intimidasi, rasa urgensi yang dirasakan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat hampir tidak dapat dibandingkan. Ini bukan masalah baru. Pada bulan Mei 2003, misalnya, Amerika Serikat menuntut sebuah kebijakan garis keras melawan Korea Utara, yang oleh pemerintahan Bush disebut sebagai bagian dari poros kejahatan, namun Korea Selatan menganjurkan pendekatan yang lebih hati-hati. Hal ini menunjukkan perbedaan antara kedua belah pihak. Secara khusus, kemudian Presiden Roh Moo-hyun mengirim sinyal palsu ke Amerika Serikat pada tahun 2005 ketika dia mengumumkan bahwa Korea Selatan perlu berada di pusat keseimbangan di Asia Timur Laut. Selama masa hiruk pikuk untuk aliansi tersebut, Korea Selatan mengkritik Amerika Serikat karena hanya menjalankan kebijakan garis keras, dan Washington mencela Seoul karena ketergantungannya yang besar pada gerakan damai ke Korea Utara.

3.2.2.3 Dilema Asimetris

Hambatan ketiga adalah dilema aliansi asimetris, yang muncul selama interaksi aliansi tersebut. Aliansi asimetris apapun akan melibatkan *trade-off* antara jebakan/pengabaian dan keamanan/otonomi serta menyeimbangkan pembagian kembali aliansi. Jika tindakan penanggulangan pilihan aliansi berbeda, dan aliansi hanya terkait secara longgar dengan perilaku institusional atau perilaku, tindakan tersebut tidak dapat merespons secara tepat ancaman umum. Misalnya, selama ROK-U.S 1993. Presiden Kim Young-sam mengkritik Amerika Serikat sebagai sekutu karena gagal mempertahankan kepercayaan Korea Selatan. Dalam partikulat, Kim menyatakan ketidakpuasannya terhadap Amerika Serikat hanya menginformasikan telah memutuskan kebijakan ke Korea Selatan. Pada tahun 1994, terlebih lagi, Korea Selatan takut terlibat dalam serangan udara operasi yang direncanakan di Korea Utara pada saat yang sama, Seoul khawatir disingkirkan dalam dialog A.S. dengan Korea Utara. Setelah kerangka kerja setuju ditandatangani, aliansi tersebut mengalami konflik pembagian biaya, termasuk mendanai reaktor yang dijanjikan, yang pada akhirnya membiarkan Pyongyang membeli waktu untuk mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Dilema yang tak terelakkan intrinsik dalam struktur aliansi asimetris harus diatasi dengan kredibilitas aliansi, dan tujuan utama yang harus dicapai pada pertemuan puncak ini harus memulihkan kredibilitas tersebut. Pertama, Korea Selatan perlu menghadiri perhatian A.S. dengan menangani posisinya mengenai penerapan THAAD dan kebijakan Korea Utara-nya.

3.2.2.4 Gerakan Anti Amerika Serikat di Korea Selatan

Sumber ketegangan lainnya adalah turunnya dukungan untuk Amerika Serikat di Korea Selatan karena generasi yang hidup selama Perang Korea 50 tahun lalu perlahan-lahan meninggal dunia. Meskipun perasaan anti Amerika selalu ada sejak kehadiran pasukan A.S. di Korea, insiden sipil-militer karena latihan militer memiliki dampak buruk terhadap dukungan bagi militer A.S. sebagai contoh, pada akhir tahun 2002, satu-satunya masalah terbesar di Korea Selatan bukanlah program senjata nuklir rahasia Korea Utara namun sebuah kecelakaan lalu lintas dimana dua gadis sekolah Korea Selatan, saat pulang dari sekolah, dibunuh secara tragis oleh sebuah kendaraan militer AS selama sebuah latihan peningkatan dramatis dalam kekerasan anti Amerika di Semenanjung dimulai setelah dua tentara A.S. dibebaskan oleh pengadilan militer. Jumlah warga Korea yang bersimpati dengan anti Amerika terus berkembang pesat. Setelah kejadian ini, sebuah catatan 53% publik menunjukkan persepsi negatif atau tidak menguntungkan dari A.S. karena kejadian yang melibatkan kehadiran dan latihan militer (Chu, 2006:7).

3.2.3 Perkembangan Serta Pencapaian dari Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea

Aliansi keamanan antara Amerika Serikat dan Republik Korea (ROK, atau Korea Selatan) telah menunjukkan keberhasilan dengan umur panjang dan kemampuannya untuk menjaga perdamaian di Semenanjung Korea. Namun tujuan dan keefektifan aliansi sebagai alat pasca Perang Dingin untuk mencapai tujuan keamanan semakin banyak dipertanyakan. Amerika Serikat telah menekankan perlunya fleksibilitas dan ketahanan terhadap penerapan aset tetap untuk satu tujuan, sementara mitra aliansi menolak diseret ke komitmen di luar wilayah di lokasi yang jauh dari kepentingan keamanan. Kemajuan teknologi telah memungkinkan Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatan dari daratannya sendiri tanpa mengandalkan kekuatan yang dikerahkan di depan, sementara basis luar negeri dapat menjadi sumber kerentanan terhadap serangan langsung oleh aktor regional yang mengembangkan kemampuan proyeksi ancaman mereka sendiri. Sebagai hasil sampingan dari perubahan ini, beberapa berpendapat bahwa aliansi akan digantikan oleh koalisi yang berkeinginan sementara yang lain meramalkan bahwa pengaturan keamanan kolektif akan meniadakan kebutuhan untuk memobilisasi melawan ancaman umum. Implikasi dari argumen untuk aliansi AS-ROK adalah bahwa penghentian tidak dapat dielakkan, baik dalam kemunduran atau kenaikan Tiongkok dan menarik semenanjung dan perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan pasti akan menghasilkan penurunan dan pembubaran aliansi.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan bisa dibilang paling kuat sejak terbentuknya negara- Aliansi Korea Selatan pada tahun 1953. Dipererat dengan hubungan yang kuat dengan dua pemerintah konservatif berturut-turut di Seoul, kerjasama AS-Korea Selatan mengenai kebijakan Korea Utara sangat begitu kuat, dan kedua negara secara efektif mengelola aliansi tersebut dalam menghadapi ancaman perubahan dari Pyongyang. Meskipun kerja sama di Korea Utara tampaknya berlanjut, beberapa ketidakpastian dalam hubungan AS-Korea Selatan, yang disebabkan sebagian perubahan yang diakibatkan oleh pemilihan Donald Trump dan Moon Jae-in pada 2016 dan 2017, masing-masing dapat menyebabkan ketegangan yang sudah hilang selama bertahun-tahun dapat muncul kembali. Tujuan utama dari aliansi militer A.S.-ROK tampaknya akan bertahan. Presiden Trump telah mengulangi komitmen ketat Amerika

Serikat untuk mempertahankan aliansi militer dengan ROK.

4. KESIMPULAN

Konflik di semenanjung Korea dimulai sejak 25 Juni 1950 diawali hanya oleh dua negara yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Konflik yang berawal dari masa sebelum perang dingin ini telah membagi dua wilayah bertemunya dua negara *superpower* yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Alasan awal terjadinya konflik ini adalah perbedaan ideologi serta isu perbatasan yang menjadi isu yang sangat sensitif antara kedua wilayah ini, karena pembatas wilayah bukan dianggap sebagai perbatasan antar negara.

Korea Selatan berhasil berkembang dan tumbuh menjadi negara demokrasi dibawah bantuan Amerika Serikat, Ini merupakan keberhasilan Amerika Serikat yang ingin menunjukan bahwa bergabung dalam pengaruh komunis merupakan pilihan yang tidak tepat. Serta Amerika juga ingin menambah pengaruhnya di Asia Timur, dan membuat negara-negara disekitar lebih bergantung kepada Amerika.

Situasi stabilitas politik dan keamanan di semenanjung Korea saat ini masih belum memperlihatkan keadaan yang membaik. Masalah utama di semenanjung ini pada umumnya adalah ancaman nuklir Korea Utara. Kegiatan reaktor nuklir yang tidak transparan menjadikan situasi di semenanjung Korea menjadi tidak menentu.

Banyak kalangan pejabat pemerintahan Amerika Serikat berpendapat bahwa apabila program pengembangan nuklir dan teknologi misil Korea utara tidak segera dihentikan maka dalam beberapa tahun kedepan Korea Utara akan memiliki senjata nuklir yang sama dengan senjata nuklir yang dimiliki oleh Tiongkok, Perancis dan Inggris.

Peningkatan kemampuan militer di Semenanjung Korea sangat dibutuhkan karena adanya ancaman dari Korea Utara terlebih kemampuan Korea Utara saat ini tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah personil militer namun juga kemampuan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Jaminan keamanan yang diberikan Amerika Serikat sejak tahun 1953 berdasarkan *mutual defense agreement* tidak mampu Untuk menghentikan agresivitas Korea Utara untuk menghentikan provokasinya, uji coba nuklir yang sering dilakukan oleh Korea Utara telah membuat stabilitas kemanan semenanjung Korea menjadi tidak stabil, banyak pihak akan dirugikan termasuk pihak Korea Selatan serta negara-negara yang ada di wilayah Asia Timur.

Peristiwa ditenggelamkannya kapal Cheonan milik Korea Selatan oleh torpedo Korea Utara dan serangan artileri di pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 merupakan bukti meningkatnya kepercayaan diri Korea Utara dalam melakukan setiap aksi militernya.

Korea Selatan menyadari akan ancaman militer yang begitu besar dari negara tetangganya Korea Utara untuk mengantisipasi hal itu Korea Selatan harus memiliki strategi untuk menghadapi segala ancaman dari Korea Utara satu-satunya sekutu Korea Selatan yang dapat dijadikan pelindung mereka adalah dengan beraliansi dengan Amerika Serikat. Aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan keamanan di Semenanjung Korea.

Aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan di namakan CFC (*Combined Forces Comand*) dan USFK (*United States Forces Korea*), dideskripsikan sebagai cabang kesatuan dari komando Amerika Serikat Pasifik (USPACOM), yang dapat disebarkan untuk menyerang negara (dunia) ketiga dikawasan termasuk Rusia dan Tiongkok.

Setiap tahun, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara pilihan dari Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pelatihan gabungan, kombinasi gabungan yang dirancang untuk mempertahankan Republik Korea, melindungi kawasan ini, dan memelihara serta meningkatkan stabilitas pada Semenanjung Korea. *Ulchi-Freedom Guardian*, *Key Resolve*, dan *Foal Eagle* adalah beberapa latihan yang sering dilakukan.

Hadirnya Amerika Serikat di kawasan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hegemoni suatu negara di kawasan ini. Satu negara yang dikhawatirkan adalah Tiongkok melihat dari kemajuan militer Tiongkok yang signifikan dan juga peran Tiongkok yang semakin menguat dalam setiap eskalasi konflik dengan negara-negara sekitar seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Sengketa Pulau Senkaku/Diayou dengan Jepang. Amerika Serikat melihat Tiongkok sebagai ancaman terbesar langkah geopolitik Amerika Serikat dengan beraliansi dengan Korea Selatan adalah sebuah langkah jangka panjang untuk lebih menyeimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Buzan, Barry. 2008. People, States and Fear. London: Harvester Wheatsheaf.

Hermawan, 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jackson, Robert, dan Sorensen, George. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'oed, Mochtar. 2005. Masyarakat,Politik, dan pemerintahan Korea: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Paleri, Prabhakaran, 2008. National Security: Imperatives and Challenges. New Delhi: Tata Mcgraw-Hill

Perwita. A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sitepu, Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tambunan, Tulus. 2000. Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran. Jakarta: Pustaka LP3S

Yani, Yanyan dkk. 2017. Pengantar Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing

Jurnal dan Karya Ilmiah :

Effendi, Irmawan. 2013. Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan: kebijakan Extended Deterrence terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan (2005-2010). Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia.

Park, Hwi-ihn, 2011. The Korean Journal of International Studies, Korea's National Interests and Security Conditions In Age Of Globalization.

Song, Okjin, 2016. Japan's Strategic Interests On The Korea Peninsula and Resolving The History Friction. Vol.122:151-152.

Dokumen :

Chu, John S. 2006. Military Exercise in Korea: A Provocation or a Deterrent to war?. Joint Military Operations Department Naval War College, Newport, RI.

Glaser, Bonnie, dkk. 2012. Reordering Chinese Priorities on the Korean Peninsula, CSIS (Center for strategic and international studies).

Manyin, Mark E, dkk. 2011. US – South Korea Relation. CRS (Congressional Research Service) Report for Congress.

_____.2017. US – South Korea Relation. CRS (Congressional Research Service) Report for Congress.

_____.2016. US – South Korea Relation. CRS (Congressional Research Service) Report for Congress.

Snyder, Scott, 2009. Center for U.S.-Korea Policy, The Asia Foundation. Strengthening the U.S.-ROK Alliance.

Rujukan Elektronik :

Briney, Amanda. 2017. Tensions and Conflict on the Korean Peninsula. https://www.thoughtco.com/tensions-and-conflict-korean-peninsula-1435251. Diakses tanggal 28 Juli 2017.

Hayes, Peter. 2009. Extended Nuclear Deterrence: Global Abolition and Korea. http://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/extended-nuclear-deterrence-global-abolition-and-korea/. Diakses tanggal 28 Juli 2017.

Shon, Hanbyeol. 2017. The Diplomat: 3 Obstacles to Us-South Korea Cooperation on the North Korea Issue. http://thediplomat.com/ 2017/06/3-obstacles- to- us -south- korea-cooperation- on- the- north-korea-issue/. Diakses 28 Juli 2017.

USFK. 2017. http://www.usfk.mil Diakses tanggal 10 April 2017.

Voronstov, Alexander. 2012. Korean Peninsula: Old Problems and New Challenge. http//:www.apcss.org/ wp-content/ uploads/ 2012/ 09/ Chapter12.pdf [28/07/17]. Diakses tanggal 28 Juli 2017.